"Global Hub" Ekonomi Syariah

Taufik Hidayat
Direktur KNKS dan Dosen Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan

Setiap kali membicarakan pusat keuangan dan ekonomi syariah, pandangan dan perhatian orang umumnya akan tertuju ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Kondisi ini tak dapat disalahkan mengingat selama ini beberapa indikator yang diukur dan dikeluarkan berbagai lembaga pemeringkat internasional menunjukkan kondisi demikian.

Dalam laporan *Global Islamic Finance Report* (GIFR) yang dikeluarkan Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF) tahun 2018, Indonesia hanya memperoleh skor 24,13 pada Islamic Finance Country Index (IFCI) dan di peringkat keenam. Malaysia urutan pertama, diikuti Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Dengan parameter pengukuran berbeda, *Islamic Finance Development Report* tahun 2018 yang dipublikasikan ICD- Refinitiv menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dalam *Global Islamic Economy Indicator Ranking*. Dalam pemeringkatan oleh Thomson Reuters yang dipublikasikan dalam *State of the Global Islamic Economy Report* 2018-2019, Indonesia juga menempati peringkat ke-10.

Di sisi lain, negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim juga gencar menumbuhkembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang tak saja dimanfaatkan oleh negaranya sendiri, tetapi juga menjadi kesempatan memperoleh devisa dengan menjadikannya komoditas unggulan untuk dipasarkan ke negara-negara berpenduduk Muslim.

Menurut Salam Gateway, pada 2016 Brasil mengekspor daging unggas senilai 7,2 miliar dollar AS, 48,4 persen di antaranya kontribusi dari ekspor daging unggas halal. Ekspor jauh lebih besar juga dilakukan Australia, yakni 18,3 miliar dollar AS (sekitar 66,0 persen dari total ekspor bahan makanan) dan Thailand 5,8 miliar dollar AS (sekitar 16,0 persen dari total nilai ekspor bahan makanan dan minuman). Hal ini menunjukkan produk-produk ekonomi dan keuangan syariah mempunyai sifat inklusif dan tidak semata-mata hanya diperuntukan bagi negara-negara yang berpenduduk Islam saja.

Berdasarkan kondisi tersebut dan dengan adanya kesadaran bersama bahwa sebenarnya secara fundamental hampir semua faktor yang dibutuhkan untuk menumbuhkembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah telah tersedia dengan kapasitas cukup besar, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang sangat strategis dan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana serta berbagai dukungan lainnya.

Hal ini sesuai *best practices* yang telah dilakukan beberapa negara lain. Dukungan pemerintah dinilai paling berpengaruh signifikan ketimbang faktor pendukung lain. Mengacu pada kerangka kerja Malaysia dalam mengembangkan industri halal terdapat empat faktor: kebijakan (*policy*), infrastruktur, sumber daya (*resources*), dan insentif atau yang dikenal dengan PIRI Framework.

Sebagai hasil dari berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah ataupun industri keuangan dan ekonomi syariah serta berbagai pemangku kepentingan terkait dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, pada Oktober 2019 Cambridge-IIF menetapkan Indonesia sebagai pemegang peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global dengan perolehan skor 81,93 pada IFCI tahun 2019, naik dari peringkat keenam tahun 2018.

Besarnya potensi pasar Muslim yang dimiliki Indonesia menjadi catatan dalam pemeringkatan. Faktor pendukung lain adalah menguatnya regulasi keuangan syariah Indonesia, inovasi keuangan syariah, seperti halnya penerbitan *green sukuk*, pengelolaan keuangan haji yang lebih profesional melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta meningkatnya penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf.

Lompatan sangat besar juga diperoleh dari hasil penilaian ICD-Refinitiv pada November lalu, di mana peringkat Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator Ranking* bergeser dari posisi ke-10 ke peringkat ke-4 dunia. Sementara hasil pemeringkatan Thomson Reuters, Indonesia juga mengalami lompatan besar dari peringkat ke-10 ke peringkat ke-5. Kondisi ini tentunya menjadi modal awal dan momentum yang sangat bagus dalam upaya menjadikan Indonesia *global hub* ekonomi syariah.

Dengan berbekal program implementasi Masterplan Ekonomi Syariah yang sudah dipersiapkan KNKS bersama pemangku kepentingan terkait, maka akan menjadi gerakan besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Infrastruktur ekonomi syariah

Pengembangan keuangan dan ekonomi syariah yang lebih tersistem dan terintegrasi ditandai dengan telah diimplementasikannya Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) akhir 2015. Beberapa rekomendasi utama MAKSI adalah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai badan unggulan nasional, memperbaiki infrastruktur keuangan syariah, harmonisasi peraturan perundangan, optimalisasi tata kelola keuangan syariah, dan peningkatan kualifikasi SDM.

Tahapan paling krusial dan menjadi *milestone* dalam pengembangan ekonomi syariah adalah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah KNKS pada 14 Mei 2019. MEKSI ini menjadi panduan bagi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan ekonomi syariah.

KNKS telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lain untuk menyusun program implementasi MEKSI, yang nantinya akan menjadi program kerja bersama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Strategi utama yang digunakan ada empat: penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Strategi penguatan *halal value chain* didasari kebutuhan barang dan jasa, khususnya bahan makanan dan minuman dalam jumlah dan nilai sangat besar dan seharusnya bisa dipenuhi dari sumber daya di dalam negeri. Namun, kenyataannya, ketergantungan terhadap barang impor masih sangat dominan dan dorongan terhadap produksi barang yang dapat diekspor ke luar negeri masih relatif terbatas.

Kondisi ini menyumbang besar pada defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Melalui strategi pengembangan *halal value chain*, sumber-sumber produksi yang berorientasi ekspor atau substitusi impor harus mendapatkan prioritas sangat tinggi untuk ditumbuhkembangkan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi penopang kuat bagi pengembangan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Jangan sampai pengembangan ekonomi syariah hanya menjadi semacam "tukang stempel" bagi produk-produk impor yang secara masif didatangkan dari sejumlah negara lain, seperti terjadi selama ini. Diharapkan sektor UKM dapat berperan lebih aktif dalam pengembangan *halal value chain* ini mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.

Diperlukan berbagai upaya sangat masif dalam peningkatan kesadaran publik terhadap pemahaman, fungsi, dan manfaat yang akan diperoleh dalam menggunakan barang-barang dan jasa yang berskema syariah. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi masyarakat di bidang keuangan syariah pada 2016 sebesar 8,19 persen dan 2019 sebesar 8,93 persen, jauh di bawah tingkat literasi keuangan secara keseluruhan yang 29,6 persen dan 38,03 persen. Secara paralel juga perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, penguatan kapasitas R & D, dan penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola.

POJOK

Penggeledahan terkait suap komisioner KPU dilakukan pekan depan. *Bisa ketemu ruangan kosong, nih....*

◆

Pemda rancang relokasi korban banjir bandang. *Korban harus sabar, ini baru dirancang.*

◆

Modal dari Amerika Serikat sasar Indonesia. *Produk AS pasti juga* ngikut.

Mang Ukil